

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu proses pembangunan, aspek perlindungan sosial merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan seiring dengan pengentasan kemiskinan serta penurunan kesenjangan pada suatu negara (Barrientos & Hulme, 2005). Cita-cita negara Indonesia mengenai sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan Pasal 34 UUD 1945 yang dinyatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Salah satu bentuk perlindungan sosial di Indonesia adalah bantuan sosial (*social safety net program*) (Bappenas, 2014). Tujuan dari program bantuan sosial ialah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial serta mengurangi tingkat kemiskinan. Program bantuan sosial yang disediakan dapat bersifat skema kontributif (*conditional*) atau non-kontributif (*unconditional*) bagi penerima manfaatnya (TNP2K, 2019). Bansos dapat dibagikan langsung berbentuk uang (*in cash transfers*), ataupun berbentuk barang serta pelayanan (*in kind transfers*). Selain itu, bansos dapat bersifat sementara (*short-term*) lantaran adanya kondisi sosial-ekonomi tertentu, pun dapat juga bersifat jangka panjang (*long-term*) khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap (Ruelle & Rockmore, 2011).

Bantuan sosial dalam bentuk *in-kind transfer* di negara maju lebih banyak berdampak, sedangkan di negara berkembang dampak program *in-cash transfer* lebih baik jika dibandingkan *in-kind transfer* (Devereux, 2006). Hal ini disebabkan karena *in-kind transfer* di negara berkembang memiliki biaya tinggi dibandingkan negara maju. Hasil riset menunjukkan bahwa program *in-kind transfer* memiliki beberapa keuntungan, seperti dapat mendorong konsumsi; sebagai daya tarik penerima manfaat untuk tetap berada dalam program; menurunkan harga pada tingkat lokal terutama wilayah terisolir, sehingga lebih menguntungkan penerima manfaatnya (Cunha et al., 2011); dan lebih layak secara politik; sedangkan program *cash transfer* memberikan keuntungan berupa efektivitas biaya (Currie & Gahvari, 2008; Grosh et al., 2008); stabilisasi pendapatan rumah tangga *pension*; dan

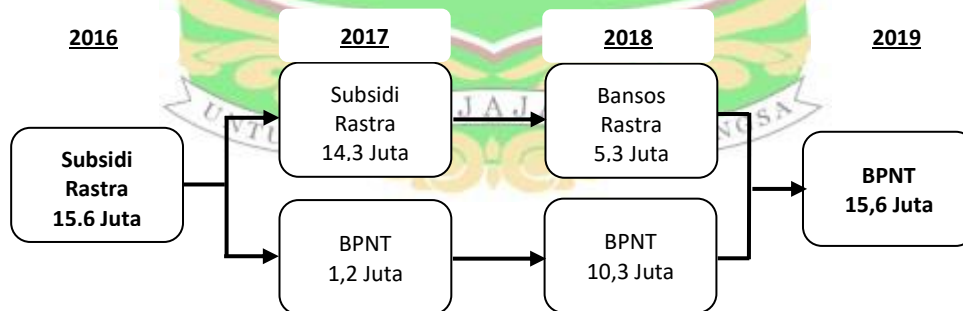
meningkatkan partisipasi sekolah anak (Duflo, 2003; ILO, 2018). *In-kind* dan *cash transfer* merupakan dua kelompok program penanggulangan kemiskinan (*anti-poverty*) yang dilakukan di berbagai negara, baik pada negara miskin, berkembang, maupun negara maju (Banerjee et al., 2021).

Bentuk sistem perlindungan sosial di atas cukup universal namun memiliki implementasi dan dampak yang berbeda di setiap negara yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu program tersebut adalah sebagai alternatif pilihan dan hanya sebagai program pelengkap untuk mengatasi berbagai masalah pada tingkat penerima (Gentilini, 2007). Berpedoman pada *Neoclassical Theory of Consumption* dan *Engel Law* (Perthel, 1975; Timmer et al., 1983), maka dapat dianalisis dampak *in-kind transfer* pada kesejahteraan rumah tangga (Bazzi et al., 2015). Teori ini berasumsi bahwa suatu rumah tangga memiliki dua preferensi terhadap dua komoditas untuk memaksimalkan utilitas yang dibatasi kendala anggaran (Southworth, 1945). Tanpa memperhitungkan variabel lain (harga jual-beli komoditas), menyebabkan *in-kind transfer* menjadi lebih bernilai bagi rumah tangga (Attanasio & Mesnard, 2006; del Ninno et al., 2003). *In-kind transfer* lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin yang cenderung mengkonsumsi komoditas makanan paling besar dalam pengeluarannya (Chen & Ravallion, 2010). Namun, Neo-Klasik berasumsi *in-kind* berdampak sama dengan *in-cash* terhadap pola pengeluaran makanan selama penerima tinggal di daerah *marginal* (Hoynes & Schanzenbach, 2009; Senauer & Young, 1986).

Umumnya, penduduk di negara-negara Asia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, atau sekitar 90% dari konsumsi beras dunia diproduksi dan dikonsumsi di Asia (Zeigler & Barclay, 2008). Secara empiris, rasio pengeluaran penduduk di wilayah Asia lebih dari setengahnya dihabiskan untuk komoditas makanan termasuk beras yang dapat dikatakan sebagai *normal goods* (von Braun & Tadesse, 2012). Namun, riset lain menunjukkan beras tidak lagi dikategorikan *normal goods*, tetapi menjadi *inferior* karena elastisitas harga permintaannya relatif kecil. Temuan ini diperoleh di beberapa wilayah Asia dengan pendapatan upah yang lebih tinggi dan standar hidup lebih baik (Hermawan et al., 2017; Huang, et al., 1991). Hal ini berarti dengan adanya *in-kind transfer* diprediksi akan menjadi *transitory income* yang dapat mendorong untuk mengurangi *budget share* pada

komoditas makanan. Berkurangnya proporsi pengeluaran makanan akan mengalihkan rumah tangga untuk mengkonsumsi komoditas bukan makanan sehingga kesejahteraannya semakin membaik (Amrullah et al., 2020; Girik-Allo et al., 2016; Gupta & Huang, 2018).

Krisis moneter pada tahun 1998 telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah kelangkaan, ketidakstabilan produksi, dan tingginya harga bahan pangan yang menyebabkan kenaikan inflasi di berbagai daerah (*consumer price index*). Sehingga, muncul kebijakan Operasi Pasar Khusus (OPK). Tujuannya adalah mengurangi beban rumah tangga miskin dan hampir miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya beras. Pada tahun 2002, program ini berganti nama menjadi program “beras untuk keluarga miskin” (Raskin) dalam bentuk subsidi pangan. Sejak tahun 2016, Raskin disosialisasikan menjadi bantuan sosial pangan “beras untuk keluarga sejahtera” (Rastra). Karena tujuannya tidak lagi hanya sebagai jaring pengaman sosial, tetapi lebih kepada perlindungan sosial (*social safety net*) bagi rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin (Bappenas, 2014; Hastuti et al., 2008). Sasarannya yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan (beras) melalui subsidi pembelian beras dengan alokasi sebesar 15 kg setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan, dengan Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp. 1.600/kg beras medium Bulog (TNP2K, 2019).



Sumber: Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan, TNP2K (2019).

Gambar 1.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra atau BPNT, 2016-2019

Jumlah KPM Rastra tahun 2016 adalah sebanyak 15,6 juta, namun di tahun 2017 pemerintah mulai menerapkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) secara terbatas pada 44 kota terpilih yang terdiri dari 14,3 juta KPM Rastra dan 1,2 juta

KPM BPNT. BPNT adalah skema bantuan sosial pangan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan 40% terendah berbentuk *in-kind* namun penyalurannya melalui *electronic voucher*. KPM BPNT mendapatkan saldo di akun rekening bank sebesar Rp. 110.000/KPM per bulan pada rumah tangga pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saldo dapat ditukarkan dengan manfaat berupa beras dan telur berkualitas pada pedagang bahan pangan (*e-warong*) yang bekerjasama dengan perbankan. BPNT adalah bantuan sosial pangan berskema *non-cash* dan non-kontributif (*non-cash food assistance*) untuk meningkatkan ketepatan sasaran pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong keuangan inklusif (Perpres No. 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif). Jumlah KPM pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 15,6 juta di 317 kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,3 juta KPM BPNT dan 5,3 juta KPM Rastra. Tujuan BPNT adalah untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, memberikan banyak pilihan dan kendali pada rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) (BPS, 2020a; TNP2K, 2019).

Tabel 1.
Indikator Kemiskinan Daerah di Indonesia, Maret 2017-2019
(Rupiah/Kapita/Bulan, Juta Jiwa, Persen, Poin)

Indikator Kemiskinan	Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Garis Kemiskinan (Rupiah)	2019	442.062	404.398	425.250
	2018	415.614	383.908	401.220
	2017	385.621	361.496	374.478
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa)	2019	9,99	15,15	25,14
	2018	10,14	15,81	25,95
	2017	10,67	17,10	27,77
Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Persen)	2019	6,69	12,85	9,41
	2018	7,02	13,20	9,82
	2017	7,72	13,93	10,64
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	2019	1,05	2,18	1,55
	2018	1,17	2,37	1,71
	2017	1,24	2,49	1,83
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	2019	0,24	0,55	0,37
	2018	0,29	0,63	0,44
	2017	0,31	0,67	0,48

Sumber: Susenas Maret 2019; (BPS, 2020a).

Bansos pangan yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk *in-kind transfer* seperti Rastra atau BPNT sebagai *social safety net program*, memiliki fungsi utama dalam penurunan tingkat kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar (*basic needs*) yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita sehari karena dapat menentukan garis kemiskinan di suatu wilayah (BPS, 2020b; TNP2K, 2019). Kemiskinan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan bukan makanan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan adalah permasalahan multidimensi baik *cross-sectors*, *cross-areas*, dan *cross-generation*, maka penanganannya juga memerlukan upaya multidimensi (Alkire et al., 2015; Silva & Sumarto, 2014). Selain itu, kemiskinan juga terindikasi dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, semakin tinggi kedua indeks tersebut maka semakin buruk. Indeks kedalaman memberi gambaran terkait rerata kesenjangan pengeluaran tiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan indeks keparahan merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia (2017-2019) di perkotaan dan perdesaan, tidak begitu signifikan penurunannya. Yang mengindikasikan pengeluaran rumah tangga cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran semakin merata (BPS, 2020a).

Tabel 2.
Distribusi dan Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga,
Maret 2019 (Rupiah/Kapita/Bulan, Persen)

Indikator Pengeluaran Rumah Tangga	Kota	Desa	Kota+Desa
Pengeluaran per Kapita/Bulan (Rp)	1.388.212	882.829	1.165.241
Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga (%) :			
Proporsi pengeluaran makanan	46,70	55,59	50,86
Proporsi pengeluaran bukan makanan	54,10	45,90	49,14
Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga (%) :			
40 % Penduduk dengan pendapatan terendah	16,93	20,59	17,71
40 % Penduduk dengan pendapatan menengah	37,09	39,67	36,81
20 % Penduduk dengan pendapatan tertinggi	45,98	39,74	45,48
<i>Gini Index</i> (Indeks Ketimpangan Pendapatan)	0,390	0,320	0,380

Sumber: Susenas Maret 2019; (BPS, 2020a).

Rata-rata pengeluaran/kapita/bulan rumah tangga di perkotaan lebih besar daripada perdesaan dengan selisih sekitar Rp. 505.383. Rumah tangga di Indonesia mengalokasikan lebih dari 50,86% dari total pengeluaran sebulan untuk kebutuhan makanan. Di perdesaan, alokasi pengeluaran untuk makanan lebih besar dibanding di perkotaan atau sebaliknya. Indeks ketimpangan (*gini ratio*) perkotaan dan perdesaan di tahun 2019 tidak begitu timpang sebesar 0,380 atau mendekati nol, namun berdasarkan wilayah tempat tinggalnya gini ratio wilayah perkotaan lebih

tinggi dibanding perdesaan. Terlihat dari distribusi pengeluaran penduduk khususnya yang berpendapatan 40% terendah dengan selisih 3,66% antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini berarti setiap komoditas yang dikonsumsi memiliki pola pengeluaran atau tingkat kecenderungan untuk dikonsumsi tersendiri sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya (kota atau desa) dan kelompok pengeluaran rumah tangga (BPS, 2020a). Perubahan pangsa pengeluaran makanan rumah tangga tersebut dapat menentukan tingkat kemiskinan dan kesejahteraannya (Cahyadi et al., 2018; Sumarto et al., 2007). Semakin besar proporsi pengeluaran pada makanan terhadap total pengeluaran, maka bisa diasumsikan semakin miskin atau rendah tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut (Bazzi et al., 2015; Cirera & Masset, 2010).

Alokasi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makanan di negara-negara berkembang umumnya, seperti di Indonesia, mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibanding negara maju. Hal ini mengindikasikan proporsi pengeluaran rumah tangga di negara berkembang lebih sensitif terhadap perubahan pendapatan dan harga komoditas pangan (Arifin et al., 2018; Deaton & Muellbauer, 1986). Proporsi pengeluaran makanan pokok seperti beras yang semakin kecil dapat menjadi indikator tidak miskin dan membaiknya kesejahteraan rumah tangga (Skoufias & di Maro, 2008; Stampini & Tornarolli, 2012). Jika pendapatan rumah tangga semakin tinggi, maka *budget share* makanan akan menurun dan pengeluaran makanan akan mencapai titik jenuh setelah permintaan pada makanan tidak responsif terhadap peningkatan pendapatan. Hal ini tentunya tidak sepenuhnya berlaku jika diaplikasikan hanya pada satu rumah tangga, namun berlaku pada sekelompok rumah tangga (Banerjee & Shivani, 2011). Dengan meningkatnya pendapatan, tidak hanya kuantitas makanan saja yang berkurang proporsinya, tetapi *bundle* makanan yang dikonsumsi juga akan berubah (Cirera & Masset, 2010). Proporsi pengeluaran makanan cenderung menurun secara aritmatik selaras dengan peningkatan pendapatan yang bergerak geometrik (Bazzi et al., 2015; Cahyadi et al., 2018). Misal, proporsi pengeluaran makanan Indonesia tahun 1993 sebesar 63,4% menjadi 50,86% di tahun 2019.

Banyak faktor yang mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga secara teoritis dan empiris, diantaranya adalah harga komoditas yang dikonsumsi dan

tingkat pendapatan itu sendiri. Terdapat pula variabel lain yang dapat mengubah pola pengeluaran rumah tangga, seperti utilitas dan pilihan konsumsi, karakteristik demografi dan sosial-ekonomi (*demographic and socio-economic characteristics*), faktor keuangan (perubahan pendapatan dan kekayaan), ekspektasi dan intensitas untuk membelanjakan pendapatan (Romer, 2012; Syahrudin, 1981). Rastra atau BPNT dapat saja menjadi salah satu sumber pendapatan jangka pendek (*transitory income*) terhadap *measured income* rumah tangga sebagai pembentuk *permanent income* yang dapat digunakan untuk konsumtif dan produktif secara bersamaan. Sehingga sangat menarik jika dilakukan kajian dampak Rastra atau BPNT yang bersifat *unconditional* dengan skema *non-kontributif* terhadap pola pengeluaran dan status kemiskinan rumah tangga di Indonesia (Alimi, 2015; Dwiputri, 2017).

B. Perumusan Masalah

Banyak literatur dan hasil empiris yang mengaitkan antara pola pengeluaran dan status kemiskinan rumah tangga, bahwa pengeluaran terhadap makanan pokok (*basic needs*) seperti beras merupakan komponen pengeluaran terbesar pada rumah tangga miskin, dapat mencapai sepertiga pengeluarannya (Kearney, 2010; Kirwan & McMillan, 2007; Malik et al., 2015). Karena kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar atau *food insecurity* (Cahyat et al., 2007). Dengan adanya bantuan sosial pangan Rastra atau BPNT, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan pengeluaran makanan bagi rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat yang rentan dan rawan pangan terbesar (TNP2K, 2019). Studi di negara berkembang menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung mengkonsumsi lebih banyak makanan pada saat menerima *in-kind transfer* (del Ninno et al., 2003; Omamo et al., 2010).

Di Indonesia, bantuan sosial pangan dalam bentuk *in-kind* dapat berdampak pada pengeluaran makanan rumah tangga penerima manfaat khususnya seperti Raskin, Rastra, dan BPNT (Banerjee et al., 2021; Djamaluddin, 2015; Girik-Allo et al., 2016; Pangaribowo, 2012). *In-kind transfer* dalam bentuk voucher adalah bantuan sosial pangan yang lebih banyak digunakan di negara berkembang saat ini, termasuk di Indonesia. Voucher program seperti Rastra atau BPNT adalah skema bantuan pangan yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional transfer*) ataupun tidak memerlukan kontribusi dari penerima manfaat (TNP2K, 2019). Riset terdahulu

menunjukkan bahwa bantuan *in-kind* lebih mendorong pengeluaran makanan suatu rumah tangga (Chavas & Yeung, 1982; Hoynes & Schanzenbach, 2009; Neenan & Davis, 1977; Senauer & Young, 1986b; Skoufias et al., 2013; West & Price, 1976). Terlepas dari realitanya, *cash transfer* semakin penting dalam sistem perlindungan sosial di seluruh dunia, namun sebagian besar transfer kesejahteraan pada rumah tangga miskin di negara maju dan negara berkembang masih *favorable* dalam bentuk *in-kind* (Barrett et al., 2011; Currie & Gahvari, 2008; Hidrobo et al., 2014; Lentz & Barrett, 2013).

Beberapa alasan bansos pangan dalam bentuk *in-kind* lebih *favorable* diantaranya adalah banyaknya program pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan konsumsi makanan tertentu dengan skema non-kontributif (Cunha et al., 2011; Currie & Gahvari, 2008), mendorong rumah tangga miskin untuk memilih sendiri skema program kesejahteraan dan memudahkan penargetannya (*targeting poor*) (Bazzi et al., 2015; Skoufias et al., 2013), seandainya komoditas yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar lokal maka dapat meningkatkan pasokan lokal dan akses rumah tangga lebih praktis secara politis, terutama pada populasi yang bukan sasaran program (*non-targeting poor*) (Banerjee et al., 2021), dan dapat mengurangi risiko penerima manfaat terutama dalam hal keamanan dan kemudahan transaksinya. Secara empiris, *in-kind transfer* memiliki manfaat relatif lebih fokus dalam pengentasan kemiskinan karena bantuannya lebih banyak dimanfaatkan untuk pengeluaran makanan (*extra-marginal*) terutama di negara-negara berkembang (Fraker, Martini, & Ohls, 1995; Hoynes & Schanzenbach, 2009).

Bansos pangan Rastra atau BPNT sebagai *social safety net* dengan banyak kelebihan. Sejak tahun 2017, penyaluran Rastra (semula dalam bentuk fisik) diubah menjadi bentuk kartu elektronik (e-voucher), dan telah diujicoba di 44 kota dengan melibatkan 1,2 juta penerima manfaat. Dengan skema BPNT, terdapat beberapa penyesuaian dalam durasi penyaluran, komoditas yang diberikan (beras dan telur), dan diyakini lebih tepat sasaran karena penerimanya lebih spesifik *by name by address* berdasarkan Baseline Data Terpadu Kementerian Sosial. BPNT adalah perpaduan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan teknologi informasi perbankan (inklusi keuangan) dan lebih mudah mengontrol dan mempercepat proses penyaluran bantuan. BPNT diduga menjadi antitesis eskresi keuangan dalam

mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang pro-masyarakat miskin (*pro-poor*) dengan mengurangi hambatan terhadap akses sistem keuangan (Demirgüç-Kunt et al., 2008; Fraker et al., 1995; Sarma & Pais, 2011).

Bantuan sosial pangan mampu meningkatkan pengeluaran makanan, namun belum tentu diikuti oleh peningkatan proporsi pengeluaran non makanannya. Tujuan pemberian bansos pangan adalah untuk meningkatkan pengeluaran pangan atau “*increased*” yang berarti adanya peningkatan kuantitas dan “*improved*” atau perlu adanya pemahaman normatif pada peningkatannya (Chen & Ravallion, 2010; Southworth, 1945). Secara agregat, proporsi pengeluaran makanan akan bias jika hanya diamati dari pengeluaran per kapita, tanpa mempertimbangkan karakteristik demografi dan sosial-ekonomi penerima manfaat (Cunha et al., 2011; Skoufias et al., 2013). Penting menganalisis dampak *in-kind transfer* berdasarkan *deprivasi* karakteristik rumah tangga seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, jumlah anggota rumah tangga, akses air bersih dan sanitasi (Dwiputri, 2017; Hoynes & Schanzenbach, 2009; Zezza et al., 2010); kepemilikan aset seperti, perhiasan, sepeda motor, mobil, perahu, dan lahan (Amrullah et al., 2020; Girik-Allo et al., 2016; Hidrobo et al., 2014); serta tempat tinggal seperti kota dan desa (Banerjee et al., 2021; Hoddinott et al., 2018; Loureiro & Holanda, 2013).

Adapun permasalahan penelitian ini adalah terkait dengan kajian teoritis dan empiris sebelumnya yang telah dijelaskan seperti di atas, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana karakteristik rumah tangga penerima manfaat bantuan sosial pangan Rastra-BPNT berdasarkan pola pengeluaran makanan dan status kemiskinan di Indonesia?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan suatu rumah tangga menjadi penerima manfaat bantuan sosial pangan Rastra-BPNT di Indonesia?
- 3) Bagaimana dampak program bantuan sosial pangan Rastra-BPNT terhadap pola pengeluaran makanan dan status kemiskinan rumah tangga penerima manfaat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga penerima manfaat bantuan sosial pangan Rastra-BPNT berdasarkan pada pola pengeluaran makanan dan status kemiskinan di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis faktor penentu suatu rumah tangga menjadi penerima manfaat bantuan sosial pangan Rastra-BPNT di Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis dampak program bantuan sosial pangan Rastra-BPNT terhadap pola pengeluaran makanan dan status kemiskinan rumah tangga penerima manfaat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dan direkomendasikan dari hasil kajian atau penelitian empiris ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi stakeholder dan pengambil keputusan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan bahan untuk evaluasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan bagi stakeholder terhadap dampak bantuan sosial pangan Rastra/BPNT dalam mengentaskan kemiskinan dan mengkaji pola pengeluaran makanan rumah tangga miskin dan hampir miskin di Indonesia. Sehingga, diharapkan untuk penyaluran bantuan sosial pangan pada masa datang lebih tepat sasaran serta berkontribusi pada perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) rumah tangga miskin dan hampir miskin.
- 2) Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pada kajian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan dampak bantuan sosial pangan Rastra/BPNT terhadap pola pengeluaran makanan dan status kemiskinan berdasarkan perbedaan karakteristik demografi, sosial-ekonomi, wilayah, dan rata-rata pendapatan per kapita di Indonesia. Sehingga dapat menjadi referensi dan diharapkan adanya berbagai kajian terkait sesuai dengan indikator variabel (prediktor dan *outcome*) yang digunakan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih fokusnya pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa batasan dan lingkup yang memerlukan kajian lebih lanjut, yaitu:

- 1) Kajian ini bersifat *explanatory research* dengan menggunakan pendekatan *quasi-experimental* berdistribusi *non-equivalent group design*, terdapat 2 kelompok Rumah Tangga (RT) diberikan kesempatan memperoleh bantuan sosial pangan Rastra/BPNT yaitu kelompok *treated* dan kelompok *control*. Estimasi dampak Rastra/BPNT terhadap pola pengeluaran makanan dan status kemiskinan RT berdasarkan deprivasi rata-rata pendapatan/kapita sebulan, karakteristik kepala RT, karakteristik RT, kepemilikan aset, literasi keuangan, dan kepulauan tempat tinggal.
- 2) Unit analisis adalah Rumah Tangga (RT) pada tingkat nasional yang diklasifikasikan sesuai dengan kelompok pengeluaran/kapita sebulan dan garis kemiskinan (*headcount index*) baik di perkotaan dan perdesaan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Kelompok perlakuan (*treated*) adalah RT penerima manfaat (*beneficiary*), sedangkan kelompok kontrol (*control*) adalah RT bukan penerima manfaat (*non-beneficiary*).
- 3) Data yang digunakan bersifat *cross-sectional* terkait RT penerima manfaat bantuan sosial pangan Rastra/BPNT, pola pengeluaran makanan, dan status kemiskinan di Indonesia berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Modul Konsumsi, Maret 2019.
- 4) Analisis yang digunakan adalah model *probit biner* untuk mengetahui faktor penentu RT menerima manfaat Rastra/BPNT. Sedangkan estimasi dampak digunakan pendekatan *propensity score matching* untuk memperoleh nilai *average treatment effect on the treated*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman Tesis ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, memuat uraian terkait dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

- 2) BAB II Tinjauan Pustaka, memuat penjelasan rinci terkait landasan teori penelitian berupa pembahasan konsep dan teori yang melandasi penelitian terkait pola pengeluaran dan status kemiskinan rumah tangga, serta program bantuan sosial pangan Rastra atau BPNT di Indonesia. Kajian ini bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel elektronik dan sumber kajian ilmiah lainnya. Bagian ini juga akan meninjau beberapa kajian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- 3) Bab III Metode Penelitian, memuat tentang desain, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan skala pengukuran variabel yang diteliti, data dan sumber data, pembentukan model penelitian serta metode analisis data yang akan digunakan dalam menjawab hipotesis penelitian.
- 4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat penjelasan rinci secara deskriptif dan kuantitatif tentang variabel yang dikaji menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Modul Konsumsi, Maret 2019. Analisis deskriptif akan menjelaskan karakteristik demografi dan sosial-ekonomi rumah tangga penerima manfaat Rastra atau BPNT di Indonesia. Sedangkan analisis kuantitatif akan menjelaskan hasil estimasi dampak bantuan sosial pangan Rastra atau BPNT terhadap pola pengeluaran dan status kemiskinan rumah tangga di Indonesia.
- 5) Bab V Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian, bagian ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan temuan empiris dari penelitian serta rekomendasi atau saran dan keterbatasan penelitian yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah, akademik, dan *stakeholder* lainnya dalam pengambilan suatu kebijakan di masa datang.